
STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING KAKAO INDONESIA DI PASAR INTERNASIONAL

STRATEGY FOR IMPROVEMENT OF INDONESIAN CACAO COMPETITIVENESS IN INTERNATIONAL MARKET

Bedy Sudjarmoko

BALAI PENELITIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR

Jalan Raya Pakuwon Km 2 Parungkuda, Sukabumi 43357

bedy_sdm@gmail.com

ABSTRAK

Kakao menjadi komoditi perkebunan dengan peran penting dalam perekonomian Indonesia. Sampai dengan tahun 2013 Indonesia masih menjadi produsen dan eksportir kakao ketiga terbesar dunia setelah Pantai Gading dan Ghana. Walaupun demikian, sejumlah masalah masih dihadapi, baik bidang produksi, pengolahan, dan perdagangan. Kontribusi ekspor kakao terhadap total ekspor Indonesia masih rendah, tetapi ekspor dalam bentuk mentah (biji kakao) sudah begeser ke ekspor produk olahan kakao. Daya saing biji kakao Indonesia di pasar internasional cukup tinggi, tetapi daya saing produk olahan kakao masih lemah. Untuk meningkatkan daya saing kakao Indonesia di pasar internasional, upaya yang dapat dilakukan meliputi perbaikan produktivitas tanaman, meningkatkan mutu produk olahan kakao, melanjutkan kebijakan tarif bea keluar biji kakao, perbaikan infrastruktur dan penciptaan iklim usaha yang kondusif.

Kata kunci: Kakao, daya saing, pasar, internasional

ABSTRACT

Cocoa has important role in the Indonesian economy. Until 2013, Indonesia was the third largest cocoa exporter and producer in the world after Ivory Coast and Ghana. However, some of problems were encountered in production, processing and trading sectors. Share of cocoa exports to Indonesian exports are still low, but exports gradually been moved from raw material (cocoa bean) to processed products. The competitiveness of Indonesian cocoa beans was high but the competitiveness of processed cocoa products still weak. To improve the competitiveness of Indonesian cocoa in the international market, it needs an efforts such as improvement crop productivity, improve the quality of processed products, continue the export tax policy of cocoa beans, infrastructure improvements and provide the conducive business environment.

Keywords: *Cacao, competitiveness, market, international*

PENDAHULUAN

Kakao merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki peran penting dalam perekonomian di Indonesia. Di samping sebagai penghasil devisa negara, peran lainnya adalah sebagai penyedia lapangan kerja di pedesaan, sumber pendapatan petani, penyedia bahan baku industri dalam negeri, dan sumber pertumbuhan ekonomi wilayah. Sebagai penghasil devisa negara, pada tahun 2012 devisa yang dihasilkan dari ekspor komoditi kakao adalah sebesar US \$ 1,05 milyar (Direktorat Jenderal Perkebunan [Ditjenbun], 2014). Nilai ekspor kakao ini menurun dibandingkan nilai ekspor tahun 2011 (US \$ 1,3 milyar) atau tahun 2010 (US \$ 1,6 milyar). Tetapi nilai devisa kakao tersebut meningkat drastis dibandingkan tahun 1990 yang hanya US \$ 127.091.

Sampai dengan tahun 2012, Indonesia menjadi produsen dan eksportir ketiga terbesar dunia setelah Pantai Gading dan Ghana, dengan produksi sebanyak 740.513 ton dan ekspor sebesar 387.790 ton dengan nilai US \$ 1.053.533.000. Sementara pada tahun yang sama produksi kakao Pantai Gading sudah mencapai 1,6 juta ton dan Ghana 1,05 ton.

Pangsa ekspor kakao Indonesia pada tahun tersebut adalah 13,6%. Sementara pemasok kakao dunia lainnya adalah Pantai Gading (38,3%), Ghana (20,2%), Kamerun (5,1%), Brasil (4,4%) dan Ekuador (3,1%) (ICCO, 2013). Pada tahun yang sama Indonesia juga masih mengimpor kakao sebanyak 48.220 ton senilai US \$ 177.022.000. Sejak tahun 2006, volume ekspor kakao Indonesia cenderung turun tetapi volume impor kakao relatif stagnan (Ditjenbun, 2014). Sayangnya, ekspor kakao Indonesia selama ini masih dominan dalam bentuk biji atau berupa produk primer yang nilai tambahnya sangat rendah. Sebagai contoh, dari 535.236 ton yang diekspor pada tahun 2009, sebanyak 439.305 ton berupa biji, sedangkan sisanya diekspor dalam bentuk pasta, butter, tepung, dan makanan yang mengandung cokelat (Ditjenbun, 2010).

Sebagai negara penghasil kakao ketiga terbesar dunia, kakao Indonesia masih banyak dihadapkan pada beberapa masalah yang sangat serius untuk ditangani dengan segera. Masalah-masalah tersebut meliputi bidang produksi, pengolahan, dan perdagangan. Masalah utama di bidang produksi adalah rendahnya produktivitas tanaman, hanya 850 kg/hektar dibanding potensinya

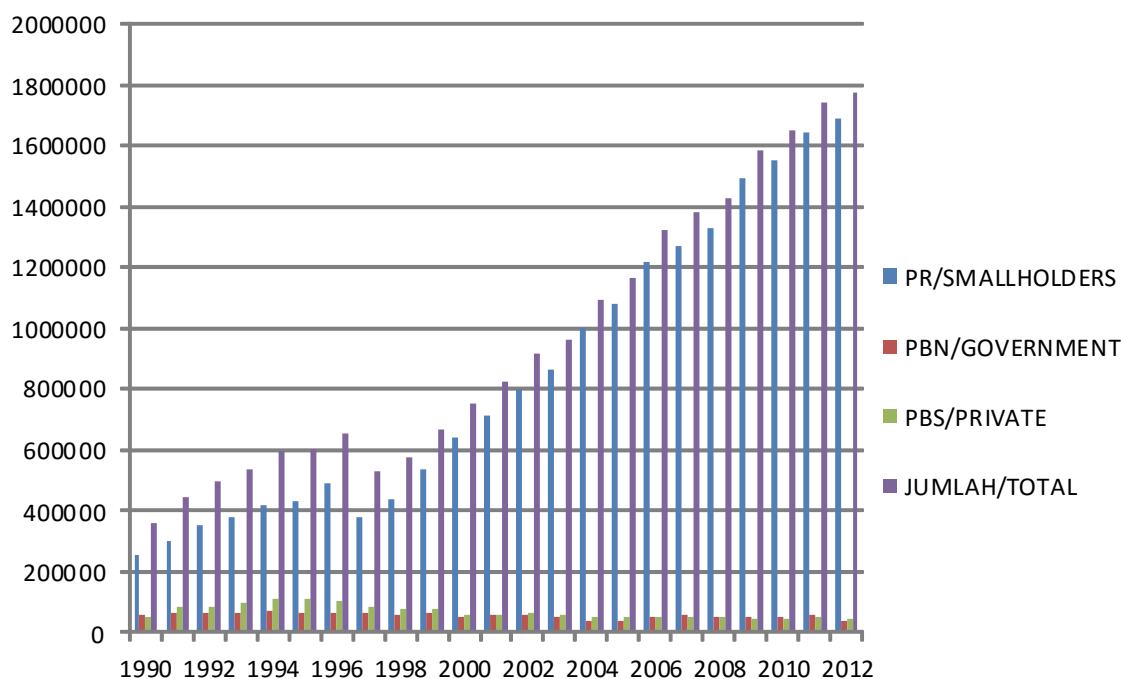
yang mencapai 2 ton/hektar. Masalah utama di bidang pengolahan adalah rendahnya mutu produk akibat pengolahan tanpa fermentasi. Masalah utama di bidang perdagangan berupa diskriminasi tarif bea masuk kakao olahan Indonesia oleh sejumlah negara Eropa yang besarnya mencapai 7–9%, sementara produk yang sama dari negara–negara Afrika dibebaskan atau dikenakan tarif bea masuk 0% (Sudjarmoko, 2013 b).

Melihat semakin ketatnya persaingan pasar kakao di dunia saat ini maka program pengembangan kakao Indonesia ke depan tidak saja diarahkan pada upaya untuk meningkatkan produktivitas tanaman semata. Peningkatan efisiensi, nilai tambah produk, daya saing, dan kemandirian bidang industri juga harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aspek pengembangan kakao nasional. Semua dimensi pengembangan tersebut hanya akan tercapai jika program pengembangan kakao secara nasional selaras dengan sistem pertanian bioindustri. Kakao yang dikembangkan dengan sistem pertanian bioindustri akan mampu memaksimalkan produksi biomassa primer dengan memanen matahari dan memanfaatkan secara menyeluruh biomassa dalam menghasilkan bahan pangan, pakan, energi, kimia, farmasi, dan bioproduk dengan tetap menjaga keseimbangan agroekologis (biotik dan abiotik). Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, peningkatan nilai tambah, daya saing, dan kemandirian bidang industri.

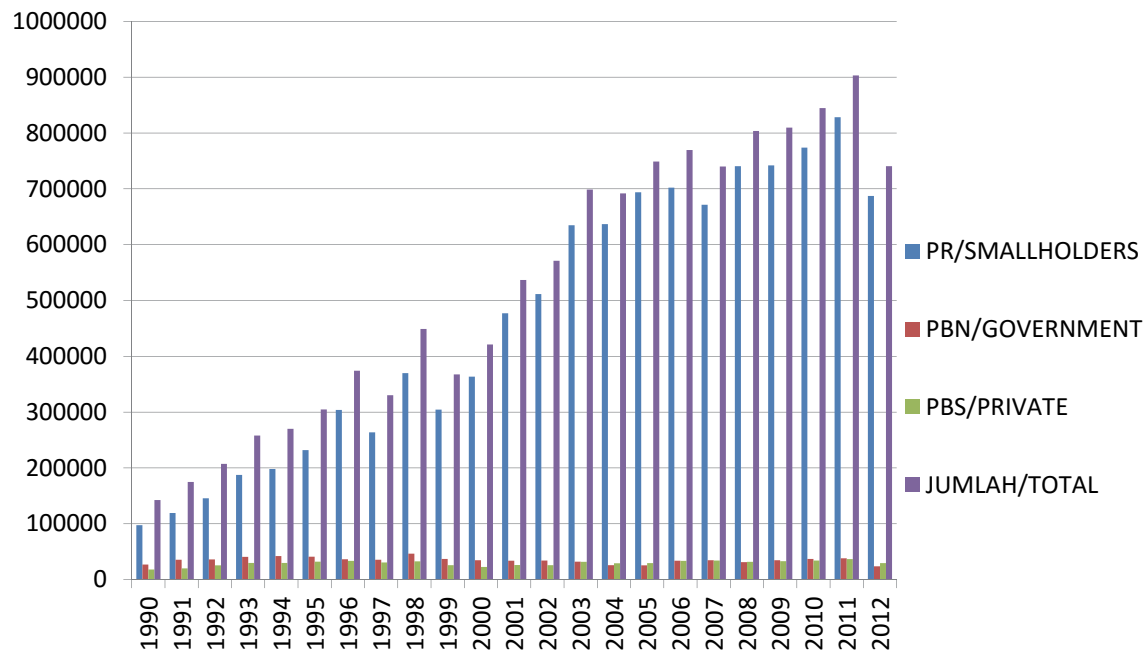
Tulisan ini membahas kondisi umum kakao Indonesia (luas areal, produksi, konsumsi, ekspor, impor, daya saing produk) termasuk upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya saing kakao Indonesia di pasar internasional.

LUAS AREAL, PRODUKSI, DAN KONSUMSI KAKAO INDONESIA

Pada tahun 2012, luas areal tanaman kakao di Indonesia mencapai 1.774.463 ha, terdiri atas perkebunan rakyat 1.693.337 ha (95,43%), perkebunan besar negara 38.218 ha (2,15%) dan perkebunan besar swasta 42.909 ha (2,42%). Produksi perkebunan rakyat sebesar 687.247 ton (92,81%), perkebunan besar negara 23.837 ton (3,22%) dan perkebunan besar swasta 29.429 ton (3,97%). Luas areal tanaman kakao di Indonesia tergolong meningkat sangat pesat. Bila pada tahun 1990 hanya 357.490 ha dan produksi sebesar 142.347 ton, pada tahun 2000 sudah meningkat sebesar 749.917 ha dengan produksi 421.142 ton dan pada tahun 2010 sudah menjadi 1.650.356 hektar dan produksi 837.918 ton. Artinya, dalam kurun waktu 20 tahun luas areal tanaman dan produksi kakao di Indonesia meningkat sekitar lima kali lipat (Gambar 1 dan Gambar 2). Kondisi tersebut membuktikan bahwa kakao menjadi komoditi perkebunan yang diminati oleh masyarakat Indonesia.



Gambar 1. Perkembangan luas areal tanaman kakao di Indonesia, 2010–2012 (Sumber: diolah dari Ditjenbun, 2013)
 Figure 1. The development of cacao area in Indonesia, 2010 –2012 (Source: processed from Ditjenbun, 2013)



Gambar 2. Perkembangan produksi kakao Indonesia, 2010–2012 (Sumber: diolah dari Ditjenbun, 2013)

Figure 2. The development of cacao production in Indonesia, 2010 – 2012 (Source: processed from Ditjenbun, 2013)

Tanaman kakao di Indonesia tersebar di Sulawesi Selatan (Sulsel), Sulawesi Barat (Sulbar), Sulawesi Tenggara (Sultra), Sulawesi Tengah (Sulteng), Papua Barat, Jawa Timur (Jatim), Lampung, Sumatera Barat (Sumbar), Sumatera Utara (Sumut), dan Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Sedangkan daerah pengembangan baru yang direncanakan untuk mendukung produktivitas dan mutu kakao nasional adalah Provinsi Papua, Kalimantan Timur (Kaltim), dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Pengembangan dan intensifikasi kakao oleh pemerintah dilakukan melalui program Gerakan Nasional (GERNAS) Kakao oleh Kementerian Pertanian, dilaksanakan dengan program rehabilitasi, intensifikasi, dan peremajaan. Program ini diarahkan untuk peningkatan produksi dan mutu hasil tanaman kakao di Indonesia (Ditjenbun, 2008). Indonesia sebenarnya berpotensi untuk menjadi produsen utama kakao dunia, apabila masalah-masalah yang dihadapi perkebunan kakao dapat diatasi dan agribisnis kakao dikembangkan serta dikelola dengan baik. Indonesia masih memiliki lahan potensial yang cukup besar untuk pengembangan kakao, yaitu lebih dari 6,2 juta ha terutama di Papua, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Maluku dan Sulawesi Tenggara. Di samping itu, tanaman kakao yang sudah ada masih berpeluang untuk ditingkatkan produktivitasnya karena rata-rata saat ini masih kurang 50% dari potensinya. Di sisi lain, produksi kakao dunia beberapa tahun terakhir ini sering mengalami defisit sehingga harga kakao dunia relatif stabil pada tingkat yang tinggi. Kondisi ini sebenarnya menjadi peluang yang baik untuk segera dimanfaatkan oleh Indonesia. Upaya peningkatan produksi kakao mempunyai arti yang strategis karena pasar ekspor

kakao Indonesia masih sangat terbuka dan pasar domestik masih belum tergarap dengan maksimal.

Sementara ini tingkat konsumsi coklat di Indonesia masih sangat rendah, yaitu hanya 250 gram/kapita/tahun (data tahun 2011) sehingga masih potensial untuk ditingkatkan seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Konsumsi coklat dunia masih didominasi oleh negara-negara maju, terutama masyarakat Eropa dengan tingkat konsumsi rata-rata sudah lebih dari 1,87 kg/kapita/tahun. Konsumsi per kapita tertinggi ditempati oleh Belgia dengan tingkat konsumsi sebesar 5,34 kg/kapita/tahun, diikuti Eslandia, Irlandia, Luxemburg, dan Austria masing-masing sebesar 4,88 kg; 4,77 kg; 4,36 kg; dan 4,05 kg/kapita/tahun (Sudjarmoko, 2013 a).

DAYA SAING KAKAO INDONESIA DI PASAR INTERNASIONAL

Ada beberapa kriteria yang umum digunakan untuk mengukur tingkat daya saing suatu produk, termasuk komoditas kakao (Estherhuizen, 2006). Kriteria tersebut antara lain: pangsa ekspor (*export share*), *revealed comparative advantage* (RCA), indeks konsentrasi pasar (IKP), dan indeks spesialisasi perdagangan (ISP).

1. Pangsa Ekspor (*ekspor share*)

Ekspor share dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Share}_{ij} = X_{ij}/X_{tj}$$

Keterangan:

Share_{ij} = share ekspor komoditi i pada negara j

X_{ij} = nilai ekspor komoditi i pada negara j

X_{tj} = nilai total ekspor negara j

2. Revealed Comparative Advantage (RCA)

RCA digunakan untuk mengukur tingkat daya saing atau keunggulan komparatif suatu komoditas, dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$RCA = \frac{(X_{ia})/(\text{total } X_a)}{(X_{iw})/(\text{total } X_w)}$$

Keterangan:

X = ekspor atau nilai ekspor

i = jenis komoditi

a = negara asal

w = dunia (world)

Apabila nilai $RCA < 1$ atau mendekati 0 maka daya saing komoditi lemah, dan nilai $RCA > 1$ maka daya saing komoditi kuat. Dengan perkataan lain, semakin tinggi nilai RCA, maka daya saing suatu komoditi semakin tinggi/kuat.

3. Indeks Konsentrasi Pasar (IKP)

Indeks konsentrasi pasar adalah indikator untuk mengetahui tingkat ketergantungan komoditi terhadap negara mitra dagang, atau intensitas perdagangan suatu negara dengan negara lain. IKP dihitung dengan cara mengkuadratkan persentase perdagangan antara suatu negara dengan negara lain. Nilai IKP ini berkisar 0–1. Semakin besar nilai IKP maka semakin besar tingkat ketergantungan suatu negara ke negara lainnya. Atau dengan perkataan lain, semakin rentan terhadap kondisi negara mitra dagangnya.

4. Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP)

Indeks spesialisasi perdagangan merupakan indikator untuk mengetahui apakah suatu negara sebaiknya menjadi eksportir atau importir suatu komoditas, dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$ISP = \frac{(X_i - M_i) \text{ ind}}{(X_i + M_i) \text{ ind}}$$

Keterangan:

ISP = indeks spesialisasi perdagangan

X_i = ekspor barang tertentu dari Indonesia

M_i = impor barang tertentu dari Indonesia

Nilai ISP berkisar 0–1. Bila $ISP \geq 0,5$ maka Indonesia cenderung sebagai eksportir dan sebaliknya.

Berdasarkan kriteria umum untuk mengukur tingkat daya saing produk tersebut maka gambaran umum dan daya saing kakao Indonesia disajikan pada pokok bahasan berikut ini.

Share Ekspor Kakao terhadap Total Ekspor Nasional

Sampai dengan tahun 2011, ekspor nasional Indonesia sudah didominasi oleh ekspor non migas (71,26%), sedangkan ekspor migas hanya 28,74%. Share terbesar untuk komoditas perkebunan masih didominasi oleh minyak nabati dan produk kelapa sawit (10,80%) diikuti oleh komoditas kopi dan rempah/tanaman penyegar (10,34%) (Bank Indonesia, 2012). Asosiasi Industri Kakao Indonesia (AIKI) memprediksi bahwa ekspor kakao Indonesia akan tumbuh dengan laju 11%/tahun. Peningkatan nilai ekspor ini terjadi karena produk yang diekspor sudah mulai bergeser dari ekspor bahan mentah (biji kakao) menjadi ekspor produk kakao olahan. Sampai dengan tahun 2011, Amerika Serikat masih menjadi salah satu tujuan ekspor kakao olahan Indonesia, dengan volume 42.215 ton dan *market share* 24% disusul RRC (15%) dan Malaysia (8%) (Gambar 3).

Negara tujuan ekspor utama untuk biji kakao masih ke Malaysia, Singapura, Amerika Serikat, China, dan Brasil. Ekspor biji kakao Indonesia ke lima negara utama tersebut, pangsanya mencapai 93,1%. Sejak tahun 2011, ekspor kakao Indonesia sudah mulai bergeser dari ekspor biji ke produk olahan. Perbandingan ekspor kakao Indonesia dalam bentuk biji dan produk olahan pada tahun 2010-2011 disajikan pada Tabel 1.

Nilai ekspor kakao Indonesia dan beberapa negara eksportir lainnya dalam periode 2002–2012 selanjutnya disajikan pada Tabel 2.

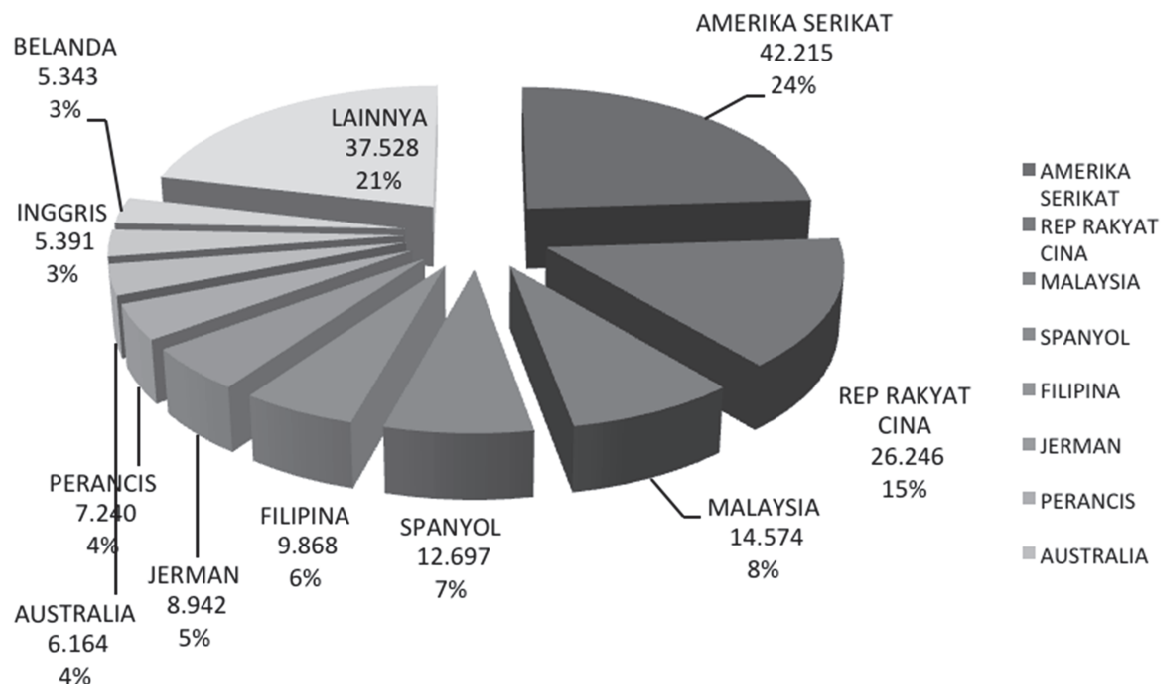
Tabel 1. Perbandingan ekspor kakao Indonesia, 2010-2011

Table 1. Comparison of Indonesian cacao exports, 2010 -2011

Keterangan	2010	2011	Naik (Turun)	
Ekpor biji kakao (mt)	432.426	210.066	(222.360)	(51%)
Nilai Ekspor (USD)	1.190.739.688	614.496.350	(576.243.338)	(48%)
Ekspor Kakao Olahan (mt)	103.055	178.951	75.896	74%
Nilai Ekspor (USD)	406.083.946	676.900.401	270.816.455	67%

Sumber: Sudjarmoko (2013 a)

Source : Sudjarmoko (2013 a)



Gambar 3. Negara tujuan ekspor kakao olahan Indonesia, 2011 (Sumber: Sudjarmoko, 2013a)
 Figure 3. Export destination of Indonesian cocoa, 2011 (Source: Sudjarmoko, 2013a)

Pada periode 2002–2011, share ekspor kakao terhadap ekspor nasional tergolong masih rendah, rata-rata sebesar 1,04%. Pada tahun 2011, nilai ekspor kakao Indonesia tercatat sebesar US \$ 1,3 milyar. Share ini diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan pengembangan dan perbaikan agribisnis kakao dalam beberapa tahun terakhir ini.

Selanjutnya, dari Tabel 2 tersebut dapat dilihat bahwa nilai ekspor kakao Indonesia pada periode 2002–2011, cenderung meningkat walaupun nilai ekspor tahun 2011 menurun dibanding tahun 2010. Peringkat pertama masih ditempati oleh Pantai Gading, dengan nilai ekspor yang terus meningkat, diikuti oleh Ghana sebagai eksportir peringkat kedua, sedangkan Indonesia masih berada di peringkat ketiga. Nilai ekspor kakao dunia pada tahun 2011 juga mengalami penurunan yang cukup

besar dibanding ekspor tahun 2010. Hal ini dipicu oleh menurunnya permintaan dunia akibat krisis ekonomi yang terjadi di kawasan Amerika dan Eropa (negara importir kakao Indonesia) yang juga berimbas ke negara-negara lain seperti China.

Ekspor kakao dari Pantai Gading dan Ghana umumnya sudah melalui proses fermentasi sehingga mendapatkan harga yang lebih tinggi dibanding ekspor kakao Indonesia. Hal ini disebabkan oleh dominannya kakao Indonesia yang diolah tanpa proses fermentasi (sekitar 80%) (Pipitone, 2013). Diskriminasi tarif bea masuk kakao olahan asal Indonesia oleh sejumlah negara importir di Eropa besarnya mencapai 7%–9%, sementara produk yang sama dari negara-negara produsen di Afrika dibebaskan atau dikenakan tarif bea masuk 0%. Masalah ini sampai sekarang belum dapat diatasi oleh pemerintah Indonesia.

Tabel 2. Nilai ekspor kakao Indonesia dan negara lainnya, 2002 – 2011
 Table 2. The export value of Indonesian cocoa and other countries, 2010–2011

(dalam US \$)						
Tahun	Indonesia	P. Gading	Ghana	Brasil	Malaysia	Total dunia
2002	701	2.297	n.a	207	239	14.375
2003	624	2.251	840	321	330	17.965
2004	549	2.182	1.071	320	445	20.166
2005	668	2.060	892	387	514	20.805
2006	855	2.035	1.241	362	568	22.984
2007	924	2.205	1.053	365	757	27.287
2008	1.269	2.807	1.042	401	1.003	32.233
2009	1.413	3.724	1.158	352	918	33.865
2010	1.644	3.827	976	417	1.303	37.815
2011	1.345	4.159	2.294	421	1.378	33.334

Sumber: Diolah dari Blomberg (2002); n.a = data tidak tersedia
 Source : Processed from Blomberg (2002); n.a = not available data

Tabel 3. Nilai RCA masing-masing negara eksportir kakao, 2002–2011
Table 3. RCA values of cocoa exportes, 2002 – 2011

Tahun	Pantai Gading	Ghana	Indonesia	Brasil	Malaysia
2002	199,8	n.a	5,30	1,48	1,10
2003	170,9	146,2	4,13	1,77	1,27
2004	145,0	191,1	3,36	1,45	1,54
2005	135,8	139,4	3,73	1,56	1,73
2006	126,2	173,6	4,29	1,33	1,79
2007	132,4	144,5	3,93	1,10	2,09
2008	136,1	129,7	4,39	0,96	2,39
2009	127,4	80,3	4,27	0,81	2,05
2010	141,3	70,9	3,96	0,80	2,49
2011	156,4	51,8	2,75	0,68	2,52

Sumber: Diolah dari Blomberg (2002); n.a = data tidak tersedia
Source : Processed from Blomberg (2002); n.a = not available data

Revealed Comparative Advantage (RCA)

Dalam sepuluh tahun terakhir ini, nilai RCA kakao Indonesia rata-rata masih diatas 4, yang berarti bahwa daya saing kakao Indonesia cukup baik. Akan tetapi RCA pada tahun 2011 menurun menjadi hanya 2,75 dan nilai ini hampir sama dengan RCA kakao Malaysia yang sebesar 2,52 (Tabel 3).

Hasil yang sejalan tentang nilai RCA ini juga dikemukakan oleh Hasibuan, Nurmalina, & Wahyudi (2012) dengan menggunakan data dari berbagai sumber (Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Kementerian Perdagangan, International Trade Center/ITC, dan International Cocoa Organization/ICCO). Hasibuan *et. al* (2012) mendapatkan nilai RCA untuk biji kakao Indonesia pada periode 2001–2010 sebesar 14,1. Walaupun berbeda besaran nilainya, akan tetapi indikasi yang ditunjukkan adalah sama, yaitu biji kakao Indonesia memiliki daya saing yang kuat (dicerminkan oleh nilai $RCA > 1$). Sementara RCA untuk produk kakao olahan (kakao bubuk dan pasta), nilainya lebih kecil lagi walaupun masih > 1 (masih memiliki daya saing yang kuat), sedangkan untuk produk kakao butter, pada periode 2001–2010 nilai $RCA < 1$ (daya saing lemah). Khusus untuk kakao butter ini, posisi Indonesia masih jauh berada di bawah Pantai Gading, Belanda, Perancis, dan Malaysia.

Selanjutnya Hasibuan *et. al* (2012) juga menyajikan informasi tentang daya saing kakao Indonesia ke berbagai pasar ekspor yang diukur berdasarkan besarnya nilai CMSA (*constant market share analysis*) dengan tiga indikator utama (*competitiveness effect*, *initial specialization*, dan *adaptation*). Data yang digunakan bersumber dari Kementerian Perdagangan, dengan tujuan ekspor ke negara-negara ASEAN, Amerika Serikat, Uni Eropa dan China. Dari besaran nilai CMSA tersebut diinformasikan bahwa produk kakao Indonesia yang memiliki daya saing tinggi pada beberapa pasar ekspor tersebut adalah produk kakao olahan.

Indeks Konsentrasi Pasar

Perkembangan nilai IKP ekspor kakao Indonesia dari tahun 2002 – 2011 disajikan pada Tabel 4.

Rata-rata nilai Indeks Konsentrasi Pasar ekspor biji kakao Indonesia selama kurun waktu 2002–2011 adalah sebesar 0,35. Nilai ini mengindikasikan bahwa ekspor biji kakao Indonesia memiliki tingkat ketergantungan yang kecil terhadap negara tujuan ekspor (Malaysia, Singapura, China, Amerika Serikat, dan Perancis). Atau dengan perkataan lain, bila di negara-negara tujuan ekspor tersebut terjadi kegoncangan atau krisis ekonomi maka pengaruhnya terhadap ekspor biji kakao Indonesia sangat kecil.

Tabel 4. Perkembangan nilai IKP ekspor kakao Indonesia, 2002 – 2011

Table 4. The development of Indonesian index of market concentration cacao exports, 2002–2011

Tahun	Nilai HHI
2002	0,31
2003	0,36
2004	0,38
2005	0,37
2006	0,35
2007	0,34
2008	0,39
2009	0,38
2010	0,37
2011	0,34

Sumber: Diolah dari Blomberg (2012)
Source : Processed from Blomberg (2012)

Indeks spesialisasi perdagangan (ISP)

Data pada Tabel 5 memperlihatkan bahwa nilai ISP kakao Indonesia pada tahun 2002–2010 rata-rata diatas 0,80 dan menurun menjadi 0,77 pada tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia selama ini memang menjadi negara eksportir kakao.

Strategi Peningkatan Daya Saing Kakao Indonesia

Prospek permintaan dunia kakao di waktu yang akan datang diproyeksikan masih akan terus meningkat. Kondisi ini seharusnya dimanfaatkan oleh para pelaku dan pemangku kepentingan usaha kakao di

Indonesia. Strategi peningkatan daya saing kakao Indonesia dapat dilakukan baik dari sisi permintaan (*demand side*) maupun sisi penawaran (*supply side*). Dari sisi penawaran, hal yang dapat dilakukan adalah melalui peningkatan produksi dan produktivitas kakao nasional, perbaikan mutu kakao, termasuk insentif fiskal bagi para pelaku usaha kakao. Dari sisi permintaan, dapat dilakukan melalui pengembangan dan perluasan pasar domestik, pengembangan, dan perluasan pasar internasional. Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan, yaitu melalui pameran, promosi, dan ekspo di dalam negeri maupun di negara-negara importir kakao.

Beberapa alternatif strategi peningkatan daya saing kakao Indonesia yang dapat ditempuh antara lain:

1. Melanjutkan Kebijakan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman serta Mutu Produk Olahan (Gernas Kakao)

Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional (Gernas) kini menjadi salah satu program unggulan Kementerian Pertanian, khususnya Direktorat Jenderal Perkebunan. Dalam program yang berlangsung dari 2009-2011 ada tiga kegiatan yang dilakukan pemerintah, yakni intensifikasi, rehabilitasi, dan peremajaan. Selama tiga tahun itu, pemerintah menetapkan sasaran perbaikan kebun kakao seluas 450.000 ha. Perinciannya, areal intensifikasi seluas 145.000 ha, rehabilitasi 235.000 ha, dan peremajaan 70.000 ha. Gernas kakao Indonesia dimaksudkan untuk meningkatkan produksi, produktivitas, dan mutu kakao Indonesia. Program ini dilakukan melalui peremajaan tanaman, intensifikasi, dan rehabilitasi kakao dengan cara memberikan bantuan berupa benih unggul, pupuk, obat-obatan dan sarana produksi lainnya.

Sebagaimana kebijakan pemerintah yang berskala nasional pada umumnya, pada awal diluncurkan selalu menimbulkan pandangan pro dan kontra di sebagian kalangan masyarakat, khususnya para pemangku kepentingan. Apalagi setelah kebijakan berjalan, ada saja program yang mendapat kritikan tajam. Sebagai contoh, pada program rehabilitasi tanaman, Asosiasi Kakao Indonesia (ASKINDO), mengkritisi sumber kebun entres untuk kegiatan sambung samping. Menurut ASKINDO, kebun sumber entres tersebut banyak diambil dari kebun kakao petani yang belum disertifikasi, bukan dari kebun entres yang memang dikelola untuk tujuan produksi mata entres

(jelas sertifikasinya). Selain itu kritik ASKINDO juga tertuju pada pohon kakao yang akan direhabilitasi. Pohon-pohon kakao tersebut diambil dari "hutan kakao" yang jauh jangkauannya sehingga menyulitkan dalam proses evaluasi dan monitoring pelaksanaannya. Kritik juga menyangkut perusahaan peserta tender yang dianggap kurang memiliki skill yang memadai dalam proses penyediaan sumber benih yang bermutu. Padahal benih yang harus disediakan dalam kegiatan Gernas tersebut harus memenuhi standar baku sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh GAP (*good agricultural practices*).

Dari sudut pandang pemerintah pusat, dalam hal pelaksanaan Gernas kakao pemerintah pusat melalui kebijakan fiskal (APBN) dan petani kakao sudah berperan optimal. Sebaliknya, peran sebagian besar pemerintah daerah dan para pelaku usaha masih belum optimum. Harapan pemerintah pusat adalah peran pemerintah daerah, para pelaku usaha dan pemangku kepentingan lebih optimum lagi. Setidaknya dalam hal memelihara tanaman kakao yang sudah diperbaiki melalui Gernas. Bagaimanapun juga Gernas kakao sudah memberikan efek positif terhadap produksi kakao nasional melalui peningkatan produksi di wilayah-wilayah Gernas. Peningkatan produksi kakao tersebut akan terus berlangsung seiring dengan pertambahan umur tanaman. Namun bila kebun kakao hasil Gernas tersebut tidak dipelihara, tentu potensi peningkatan produksi tersebut tidak akan tercapai.

Masalah lainnya adalah terbatasnya anggaran pemerintah yang dapat dialokasikan untuk program Gernas kakao. Selama ini program tersebut hanya dibiayai oleh dana pemerintah melalui APBN. Diharapkan untuk program Gernas selanjutnya, ada sumber dana lain sehingga APBN sifatnya hanya menjadi pengungkit saja. Dengan demikian, sinergitas dari seluruh pelaku dan pemangku kepentingan dapat diwujudkan secara optimal. Mengingat Gernas kakao memiliki tujuan yang sangat baik maka kebijakan pemerintah ini perlu untuk dilanjutkan dengan skala yang lebih luas dan dengan beberapa perbaikan yang dianggap perlu. Artinya, Gernas harus diperluas cakupan areal tanamannya disertai dengan perbaikan-perbaikan, misalnya dalam hal sumber kebun entres dan perusahaan peserta tender penyedia benih tanaman.

Tabel 5. Nilai ISP pasar kakao beberapa negara, 2002 -2011
Table 5. ISP values of cocoa market countries, 2002 -2011

Tahun	Pantai Gading	Ghana	Indonesia	Malaysia	Brasil
2002	1,00	-1,00	0,83	0,16	0,25
2003	1,00	0,99	0,77	0,01	0,39
2004	1,00	0,99	0,73	0,08	0,58
2005	1,00	1,00	0,77	0,09	0,54
2006	1,00	1,00	0,84	-0,13	0,47
2007	1,00	0,99	0,84	-0,07	0,26
2008	1,00	0,99	0,83	-0,12	0,30
2009	1,00	0,99	0,84	0,02	0,12
2010	1,00	0,99	0,82	0,06	0,20
2011	1,00	0,99	0,77	0,03	0,24

Sumber: Diolah dari Blomberg (2012)

Source : Processed from Blomberg (2012)

2. Peningkatan Mutu Produk

Indonesia memang menjadi produsen kakao ketiga terbesar dunia. Akan tetapi biji kakao Indonesia 80% diolah tanpa proses fermentasi. Hal ini telah mengakibatkan rendahnya mutu biji kakao Indonesia. Rendahnya mutu biji kakao Indonesia ini telah berdampak negatif terhadap harga ekspor biji kakao Indonesia dalam bentuk lebih rendahnya harga yang diterima dibanding kakao negara-negara produsen lainnya. Pada tahap lebih lanjut, lebih rendahnya harga ekspor biji kakao Indonesia tersebut telah menyebabkan devisa yang diperoleh negara dari komoditi kakao menjadi berkurang. Peningkatan mutu kakao Indonesia dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan biji kakao melalui proses fermentasi. Nilai tambah biji kakao yang diolah melalui proses fermentasi dapat mencapai Rp3.000,00/ kg.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu produk kakao serta olahannya sudah banyak dilakukan. Sebagai contoh, kebijakan yang diatur melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/9/2012 tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Kakao dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan O.T 140/2/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian serta Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 157/M-IND/PER/5/2009 tentang aturan perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45/M-IND/PER/5/2009 tentang pemberlakuan SNI kakao bubuk secara wajib. Akan tetapi, semua upaya ini harus didukung oleh semua pihak, khususnya para pedagang kakao dalam bentuk apresiasi yang lebih memadai atas produk kakao petani yang sudah diproses melalui fermentasi. Dengan demikian, ada insentif yang kuat bagi petani untuk terus memperbaiki mutu biji kakao yang dihasilkan melalui harga pembelian yang lebih baik.

Di samping tingkat apresiasi yang lebih baik terhadap biji dan produk kakao, ada baiknya finalisasi dan implementasi terhadap regulasi Sistem Sertifikasi Kakao Indonesia Berkelanjutan/ *Indonesian Sustainability for Cocoa (ISCocoa)* sudah mulai dijalankan secara ketat. Kebijakan ini merupakan sistem sertifikasi yang menggunakan pendekatan berbasis risiko serta perbaikan secara terus menerus (berkesinambungan). Sistem ini dirancang untuk mengapresiasi perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pihak yang disertifikasi, untuk meningkatkan

dampak positif dari praktek berkelanjutan dalam sistem produksi, dengan mengacu kepada standar internasional dan nasional yang berlaku.

Secara konseptual, *ISCocoa* bertujuan: (1) meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas kakao; (2) meningkatkan produksi, produktivitas, dan mutu kakao; (3) meminimalisasi kerusakan lingkungan; (4) meminimalisasi dampak negatif terhadap kondisi sosial; dan (5) menegakkan sarana perdagangan yang berkeadilan. Proses sertifikasi ini melibatkan pelaku usaha di sektor kakao, lembaga sertifikasi *ISCocoa* yang sudah diverifikasi oleh Komite *ISCocoa*, dan tim verifikator yang bertugas mengaudit kecukupan dokumen dan melakukan audit lapang yang hasilnya dilaporkan kepada Komite *ISCocoa* untuk dibahas oleh Komisi Teknis (Massusungan, 2013).

3. Kebijakan Pemberlakuan Tarif Bea Keluar (TBK)

Sampai saat ini kakao Indonesia masih di ekspor dalam bentuk biji (produk primer) sehingga nilai tambahnya hanya dinikmati oleh negara tujuan ekspor utama seperti Malaysia, Amerika, Singapura, Brazil, dan China. Sebagai upaya untuk mendorong berkembangnya industri dalam negeri serta meningkatkan nilai tambah yang dapat dinikmati oleh petani dan pelaku industri kakao lainnya maka pemerintah memberlakukan kebijakan Pengenaan Bea Keluar melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 25 Tahun 2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Dasar hukum penetapan Kebijakan Bea Keluar pada komoditas kakao adalah Peraturan Menteri Keuangan No. 75 Tahun 2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Tujuan Kebijakan Tarif Bea Keluar (TBK) pada komoditas kakao adalah (1) untuk menjamin penyediaan bahan baku industri pengolahan kakao dalam negeri dan (2) meningkatkan nilai tambah produk pertanian primer/biji kakao.

Berdasarkan peraturan tersebut, ekspor biji kakao Indonesia saat ini dikenakan bea keluar yang besarnya ditentukan oleh harga ekspor (Permenkeu No. 25 Tahun 2012). Bila harga ekspor biji kakao US \$ 2.000–2.750/ton, tarif bea keluar sebesar 5%. Harga ekspor US \$ 2.750–3.500/ton dikenakan bea sebesar 10%, dan harga ekspor $\geq$ US \$ 3.500/ton dikenakan pajak bea keluar sebesar 15%.

Tabel 6. Ekspor kakao Indonesia sebelum penerapan TBK, 2007–2009
Table 6. Indonesian cocoa exports before export tariff, 2007 – 2009

Uraian	2007	2008	2009
Produksi biji kakao (mt)	520.108	530.372	545.073
Biji kakao diekspor (mt)	379.829 (73%)	380.513 (72%)	439.305 (80%)
Biji kakao diolah (mt)	140.279 (27%)	149.859 (28%)	105.768 (20%)

Sumber/Source: Sudjarmoko (2013 a)

Tabel 7. Ekspor kakao Indonesia setelah penerapan TBK, 2010 -2012
Table 7. Indonesian cocoa exports after export tariff, 2010-2012

Uraian	2010	2011	2012*)
Produksi biji kakao (mt)	559.016	459.255	500.000
Biji kakao diekspor (mt)	432.427 (77%)	210.067 (46%)	120.000 (24%)
Biji kakao diolah (mt)	126.589 (23%)	249.188 (54%)	380.000 (76%)

Sumber/*Source*:Sudjarmoko (2013 a)

Salah satu tujuan utama dari kebijakan pemberlakuan tarif bea keluar adalah untuk meningkatkan nilai tambah kakao Indonesia yang diekspor. Bila selama ini ekspor kakao Indonesia didominasi oleh ekspor biji mentah, dengan pengenaan tarif bea keluar ini diharapkan pelaku usaha kakao di dalam negeri akan mengolah terlebih dahulu sehingga nilai tambah kakao tersebut dapat dinikmati oleh para pelaku usaha kakao di dalam negeri. Dari sisi pabean, pengenaan tarif bea keluar kakao yang diekspor dalam bentuk biji mentah, seharusnya dikenakan tarif bea keluar yang lebih tinggi, sedangkan ekspor dalam bentuk kakao olahan, seharusnya dikenakan tarif bea keluar yang lebih rendah. Hal ini dimaksudkan agar tujuan penerapan tarif bea keluar tersebut dapat tercapai.

Data ekspor kakao pada periode sebelum dan sesudah pemberlakuan kebijakan TBK menunjukkan kebijakan ini terbukti mampu mendorong perkembangan industri kakao dalam negeri sehingga ekspor tidak lagi dominan dalam bentuk produk primer (biji kakao), melainkan secara berangsur kakao Indonesia sudah diekspor dalam bentuk produk olahan kakao (pasta, tepung, butter, dan makanan yang mengandung cokelat). Perbandingan ekspor kakao Indonesia sebelum dan sesudah pemberlakuan tarif bea keluar (TBK) tersebut disajikan pada Tabel 6 dan Tabel 7.

Sebelum kebijakan IBK, kakao Indonesia yang diekspor dalam bentuk biji 72–80%, artinya dominan sebagai bahan baku kebutuhan industri. Jumlah biji kakao yang diolah di dalam negeri hanya 20–28% saja. Setelah diberlakukannya kebijakan TBK maka jumlah kakao yang diekspor dalam bentuk biji tinggal 46% pada tahun 2011 dan jumlah biji kakao yang diolah di dalam negeri menjadi 54%. Angka ini diprediksi akan terus meningkat pada tahun 2012 sehingga jumlah kakao yang diekspor dalam bentuk biji tinggal 24% pada tahun 2011 dan jumlah biji kakao yang diolah di dalam negeri menjadi 76% (Sudjarmoko, 2013 a).

Selain itu, salah satu alternatif pemikiran yang dapat dilakukan adalah dengan mengalokasikan sebagian dana yang terkumpul dari TBK agar dapat dimanfaatkan secara langsung oleh petani dan para pelaku usaha kakao di daerah untuk perbaikan agribisnis kakao.

4. Peningkatan dan Perbaikan Infrastruktur

Kakao adalah komoditas ekspor sehingga ketersediaan infrastruktur sangat berpengaruh terhadap kinerja yang dapat dicapai. Fasilitas transportasi, sarana

jalan, jembatan, pelabuhan, dan energi listrik merupakan infrastruktur yang ketersediaannya harus diperhatikan. Kebijakan peningkatan, perbaikan, dan pemantapan infrastruktur ini seharusnya dilaksanakan melalui serangkaian program seperti: (1) program peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, khususnya untuk menjangkau sentra-sentra produksi kakao; (2) program peningkatan sarana gudang dan pelabuhan yang dapat menjangkau sentra produksi kakao; (3) program peningkatan sarana listrik dan komunikasi yang dapat diakses oleh petani kakao; dan (4) program pengembangan sentra pemasaran kakao (terminal agribisnis) di wilayah pengembangan kakao (Goenadi, Baon, Herman, & Purwoto, 2013).

5. Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif

Penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi para pelaku kakao sangat dibutuhkan untuk menunjang kelangsungan dan peningkatan usaha kakao secara nasional. Termasuk penyediaan akses ke lembaga perbankan, izin investasi, fasilitasi kemudahan pengadaan mesin pengolahan yang dapat meningkatkan mutu produk kakao dan turunannya.

Disamping itu, untuk menangani permasalahan kakao secara terintegrasi, kinerja Dewan Kakao Indonesia (*Indonesian Cocoa Board*) dan asosiasi-asosiasi yang ada seperti AEKI, ASKINDO, AIKI, APIKCI, APKAI, FP2SB, AKFI, perlu dioptimalkan. Begitu juga dengan pemerintah sebagai regulator, optimalisasi perannya harus terus ditingkatkan. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Badan Litbang Pertanian, Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Bappenas, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Dinas Perkebunan Provinsi dan Kabupaten khususnya sentra produksi penghasil kakao, dan akademisi, peran nyata untuk menunjang tercapainya iklim usaha yang kondusif harus terus ditingkatkan.

Sinergitas para pelaku usaha dan pemangku kepentingan kakao dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif tidak saja untuk kepentingan produsen, melainkan juga untuk kepentingan konsumen domestik. Sebagai contoh, untuk melindungi konsumen makanan cokelat, pemerintah perlu menetapkan regulasi bahan substitusi cokelat dengan mengikuti standar Codex International, yaitu tidak lebih dari 5%. Di samping itu,

pemerintah juga perlu mendorong terbentuknya usaha-usaha industri cokelat skala UKM dan mendorong terwujudnya pemasaran yang efisien.

Agar kakao Indonesia tidak saja meningkat daya saingnya di pasar internasional, tetapi juga mampu menjadi bidang usaha yang lestari dan berlanjut (*sustainability*) bagi petani dan pelaku usaha lainnya maka program pengembangan kakao nasional ke depan harus selaras dengan pelaksanaan sistem pertanian bioindustri.

PENUTUP

Kakao menjadi komoditi perkebunan dengan peran penting dalam perekonomian Indonesia. Sampai dengan tahun 2013 Indonesia masih menjadi produsen dan eksportir kakao ketiga terbesar dunia. Walaupun demikian, sejumlah masalah masih dihadapi, baik bidang produksi, pengolahan, dan perdagangan. Kontribusi ekspor kakao terhadap total ekspor Indonesia masih rendah, namun demikian ekspor kakao Indonesia telah begeser dari bahan mentah (biji kakao) ke produk kakao olahan. Daya saing biji kakao Indonesia di pasar internasional cukup tinggi tetapi daya saing produk olahan kakao masih lemah. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya saing komoditas kakao Indonesia di pasar internasional, meliputi perbaikan dan produktivitas tanaman, meningkatkan mutu biji dan produk olahan kakao, melanjutkan kebijakan Tarif Bea Keluar (TBK), perbaikan infrastruktur, dan penciptaan iklim usaha yang kondusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. (2012). *Statistik ekonomi dan keuangan Indonesia (SEKI), 2012*. Retrieved from <https://bi.go.id>.
- Blomberg. (2012). *Cacao market update. March, 2012*. World Cocoa Foundation. Retrieved from <https://www.theice.com/marketdata/report/reportcenter.shtml>.
- Direktorat Jenderal Perkebunan. (2014). *Statistik perkebunan Indonesia 2012–2013 Kakao* (p. 57). Jakarta: Kementerian Pertanian.
- Direktorat Jenderal Perkebunan. (2013). *Statistik perkebunan Indonesia 2010–2012 Kakao* (p. 56). Jakarta: Kementerian Pertanian.
- Direktorat Jenderal Perkebunan. (2010). *Statistik perkebunan Indonesia 2009–2011 Kakao* (p. 52). Jakarta: Kementerian Pertanian.
- Direktorat Jenderal Perkebunan. (2008). *Gerakan peningkatan produksi dan mutu kakao nasional* (p. 26). Bahan presentasi Dirjenbun pada bulan Nopember 2008 di hadapan Tim Itjen Deptan.
- Estherhuizen, D. (2006). *Measuring and analyzing competitiveness in the agribusiness sector: Methodological and analytical framework* (p. 217). University of Pretoria.
- Goenadi, D. H., Baon, J. B., Herman, dan Purwoto, A. (2013). *Prospek dan Arah Pengembangan Agribisnis Kakao di Indonesia* (p.27). Jakarta: Badan Litbang Pertanian. Jakarta.
- Hasibuan, A.M., Nurmawati, R., & Wahyudi, A. (2012). Analisis kinerja dan daya saing perdagangan biji kakao dan produk kakao olahan Indonesia di pasar internasional. *Buletin Riset Tanaman Rempah dan Aneka Tanaman Industri*, 3(1), 57-70.
- International Cocoa Organization. (2013). *Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics*, 35(2). Cocoa Year 2010/2011. London, UK.
- Massusungan, A. A. (2013). *Sertifikasi kakao berkelanjutan*. Indonesian Cocoa Workshop 2013 (p. 40). Jakarta: Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.
- Pipitone, L. (2013). *Global grindings versus production*. Indonesian Cocoa Workshop 2013 (p. 28). International Cocoa Organization.
- Sudjarmoko, B. (2013a). "State of The Art" industrialisasi kakao Indonesia. *Sirkuler Inovasi Tanaman Industri dan Penyegar*, 1(1), 31– 42.
- Sudjarmoko, B. (2013b). Dampak pemberlakuan kebijakan bea keluar terhadap ekspor kakao Indonesia. *Media Komunikasi Perkebunan Tanaman Industri dan Penyegar*, 1(4).